



Falsafah ‘Merdeka Belajar Kampus Merdeka’ dan Implikasinya pada Strategi Belajar: *Critical Synthesis Review*

Ahmad Sulaiman¹, Umi Salamah²

¹Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia,

²Pascasarjana STAI Ma’had Aly Al-Hikam Malang, Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 03, 2023

Revised April 05, 2023

Accepted April 07, 2023

Available online April 08, 2023

Kata Kunci:

Filsafat Pendidikan, Pembelajaran Mandiri, Strategi Pembelajaran, Evaluasi Filosofis

ABSTRAK

Kehadiran kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan suatu usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan pendidikan Indonesia. Sayangnya, kebijakan ini mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Sebagian menilai kebijakan tersebut hadir sebagai strategi politik elektoral semata, sementara lainnya memahami kemampuan kebijakan itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Respon yang muncul pada utamanya kemudian ditujukan kepada strategi belajar yang menjadi praksis di kelas-kelas setiap jenjang pendidikan. Penelitian menginvestigasi dan mengevaluasi dasar-dasar filosofis kebijakan MBKM dalam pandangan para praktisi dan akademisi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah critical synthesis review dengan bahan analisis berupa artikel-artikel ilmiah dengan kriteria: dipublikasi dalam lima tahun terakhir, mengkaji MBKM dan ditulis oleh peneliti Indonesia. Hasil dari peninjauan menunjukkan bahwa mayoritas menilai terdapat masalah dalam filsafat pendidikan MBKM yang cenderung mendorong neoliberalisasi dan individualisasi. Implikasinya, guru atau dosen cenderung menerapkan strategi belajar yang berfokus pada individu dan mengarahkan pembelajaran pada kebutuhan industri atau pasar.

ABSTRACT

The presence of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) policy is an attempt by the government to address Indonesia's education problems. Unfortunately, he received mixed responses from the public. Some see it as a purely electoral political strategy, while others understand the policy's ability to improve the quality of education and Indonesia's human resources. The responses that emerged were mainly then directed at learning strategies that became praxis in classes at every level of education. This research is interested in investigating and evaluating the philosophical foundations of the MBKM policy from the views of Indonesian practitioners and academics. The research method used is critical synthesis review with material for analysis in the form of scientific articles with the criteria: published within the last five years, reviewing MBKM and written by Indonesian researchers. The results of the review showed that the majority considered that there were problems in the MBKM educational philosophy which tended to encourage neoliberalization and individualization. The implication is that teachers or lecturers tend to apply learning strategies that focus on individuals and direct learning to industry or market needs.

Keywords:

Educational Philosophy, Independent learning, Learning Strategy, Philosophical Evaluation

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

PENDAHULUAN

Sejak 2019 yang lalu, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dan Mendikbud Nadiem Makariem membuat kebijakan yang bernama Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebagaimana tercantum dalam laman kemendikbud, tujuan utama dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah “mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila” (Kemendikbud, 2020). Tujuan itu masih merupakan kelanjutan dari sembilan program Nawa Cita presiden, khususnya pada program ke 2, 8 dan 9 yang secara umum menyatakan keinginan luhur bangsa

*Corresponding author.

E-mail addresses: sulaiman_ahmad@umm.ac.id (Ahmad Sulaiman)

dalam mendorong kompetisi di tingkat dunia tanpa meninggalkan pembentukan karakter keindonesiaan dan tanpa mengabaikan masyarakat terpinggir (Kominfo, 2020)

Sebagai usaha untuk mencapai tujuan utama itu, maka dibuat program-program pokok turunan. Untuk Merdeka Belajar terdapat empat program pokok. Pertama, penciptaan evaluasi yang dilakukan sekolah di akhir masa belajar dengan standar nasional. Evaluasi ini disebut pula dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Kedua, menghentikan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 dimana UN juga tidak lagi menjadi instrumen untuk seleksi institusi pendidikan di jenjang berikutnya. Kedua program pokok ini saling berhubungan satu sama lain, dimana hilangnya UN digantikan dengan mekanisme USBN yang berorientasi pada penajaman kapasitas setiap sekolah untuk meningkatkan kualitas peserta didik dan menjawab kebutuhan lokal disamping nasional.

Program pokok ketiga Merdeka Belajar adalah perbaikan pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Syaiful, Kurniadi & Rahman, 2022). Pada poin ini, upaya yang dimaksud lebih kepada perubahan agar lebih ramping dan efisien dengan menghapus beberapa komponen dari RPP. Adapun program pokok keempat atau terakhir adalah memberlakukan sistem zonasi, dimana prioritas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sekolah-sekolah negeri diarahkan pada jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan alamat sekolah tujuan. Hal ini demi mendorong pemerataan pendidikan dengan tidak lagi mengutamakan nilai UN atau prestasi belajar. Upaya ini juga diharapkan dapat menghapus citra atau julukan ‘sekolah favorit’ yang menjadi salah satu penyebab kesenjangan antar sekolah-sekolah negeri.

Adapun dalam Kampus Merdeka terdapat juga empat program pokok (Syaiful, Kurniadi & Rahman, 2022). Program pertama adalah pendirian prodi baru yang lebih luwes pada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi institusi A atau B. Prodi baru itu harus diciptakan dengan kerjasama dengan industri dan mencakup semua bidang studi di luar kesehatan dan pendidikan. Kedua, sistem akreditasi yang diajukan secara sukarela dan tanpa batasan waktu habis akreditasi. Selama ini akreditasi diberlakukan lima tahun. Namun dengan kebijakan itu akan membuat prodi memiliki beban lebih ringan dan bisa fokus pada pendidikan. Terkait dengan program pertama dan kedua kampus merdeka, setiap prodi baru akan otomatis dengan akreditasi C.

Program pokok ketiga adalah mempermudah perubahan perguruan tinggi negeri menjadi berbadan hukum atau mandiri. Sekarang, kampus negeri dengan akreditasi apapun dapat mengajukan perubahan status ketika siap. Hal ini dipandang penting untuk mendorong kecepatan perguruan tinggi dalam merespon perubahan-perubahan di luar. Terakhir adalah

program tiga semester kesempatan belajar mahasiswa di luar. Dalam praktiknya, program itu dapat terdiri dari magang hingga wirausaha mandiri.

Berbagai tujuan dan program turunan sebagai cara mencapai tujuan MBKM di atas menunjukkan iktikad pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Melalui pembacaan sekilas, akan tampak bahwa upaya utama yang dilakukan adalah menciptakan fleksibilitas bagi guru, dosen maupun sekolah dan kampus. Hal ini kemudian diikuti dengan mendorong komunikasi dan kolaborasi antara sekolah/kampus dengan industri atau pasar agar menghasilkan teknologi atau pembelajaran yang menjawab persoalan nyata masyarakat.

MBKM mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Sebagian menilai ia hadir sebagai politik elektoral semata (Lestari, 2020; Purike, 2021). Bahwa MBKM merupakan cara dari pemerintah untuk meninggalkan suatu legacy melalui penciptaan dan penamaan suatu kebijakan baru. MBKM dipandangan sekedar merupakan bagian dari upaya mempersuasi masyarakat menuju pemilihan umum yang akan dilakukan pada 2024 esok. Di satu sisi, sebagian yang lain memahami kemampuan kebijakan itu bagi peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia (Baro'ah, 2020; Suryana & Iskandar, 2022). Bagi mereka, MBKM sudah tepat sasaran dalam menjawab persoalan pendidikan yang terlalu rumit, banyak hal adminstrasi, terpisah dari aspirasi masyarakat dan dipandang masih mengandung kesenjangan tajam antara si miskin dan si kaya. Meski demikian, satu hal yang pasti menjadi kegelisahan mereka adalah bagaimana implikasi dari MBKM terhadap strategi belajar yang diaktualisasi oleh guru maupun dosen dalam kelas-kelas.

Sebagian masyarakat lain melihat bahwa MBKM menggeser tidak sekedar praksis belajar di kelas, namun juga dasar-dasar filosofis dari pendidikan Indonesia (Kande, 2022; Nanggalaupi & Suryadi, 2021; Rohmad, 2020). Sampai disini, mereka kemudian mengajukan kekhawatiran akan potensi konflik antara filosofi MBKM dengan filosofi pendidikan yang telah lama menjadi ciri bangsa Indonesia. Perhatian yang lebih utama atas dasar filosofis juga muncul karena ia adalah pondasi bagi keseluruhan bangunan suatu kebijakan pendidikan, termasuk MBKM. Seringkali, apa yang menjadi dasar filosofis itu dapat mengungkap esensi dan tujuan asli atau tersembunyi dari bangunan permukaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menginvestigasi dasar-dasar filosofis kebijakan MBKM dan implikasinya pada strategi belajar di kelas. Penelitian ini berusaha mengungkap dasar-dasar filosofis itu bukan dari analisa teks-teks kebijakan MBKM, melainkan dari analisa yang telah dilakukan para praktisi dan akademisi sebelumnya. Hasil analisa mereka dipandang menggambarkan bagaimana filosofi MBKM itu dimengerti secara

aktual sebagaimana terjadi di kelas, bukan hanya secara textual dalam dokumen-dokumen kebijakan.

METEODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah critical synthesis review. Metode penelitian ini merujuk kepada proses membaca, menilai dan menyimpulkan hasil-hasil analisis dari berbagai penelitian dengan lensa kritis (Pigott & Polanin, 2020; Sarma, 2015). Lensa kritis yang dimaksudkan adalah upaya untuk menilai pokok-pokok hasil kajian, kelebihan dan kelemahan dari suatu kajian. Adapun bahan analisis berupa artikel ilmiah dengan kriteria: dipublikasi dalam lima tahun terakhir, mengkaji MBKM dan ditulis oleh peneliti Indonesia. Peneliti menggunakan database google scholar dengan kata kunci “filosofi/filsafat Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Semua judul yang relevan diunduh untuk diseleksi kembali berdasarkan abstrak. Penelitian yang melaporkan hasil analisa mengenai aspek filosofi akan dilanjutkan ke dalam proses analisis artikel satuan dengan pembacaan keseluruhan.

Mengingat kebijakan MBKM masih baru, maka penelitian dibatasi pada artikel dalam rentang waktu yang dekat. Bahan analisa haruslah artikel yang meneliti MBKM agar sesuai dengan tujuan utama penelitian yang telah disebut. Adapun penulis dari penelitian yang dikaji harus merupakan penulis dari institusi di Indonesia. Artikel ilmiah atau kajian yang ditinjau dapat menggunakan bahasa publikasi Inggris disamping Indonesia. Analisis yang dilakukan berfokus pada beberapa hal. Pertama, bagaimana struktur filosofis Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diproduksi atau diungkap oleh para peneliti. Kedua, bagaimana pandangan para peneliti itu terhadap implikasi dari nilai filosofis kebijakan itu terhadap strategi belajar yang dilakukan di kelas. Ketiga, dilakukan pula kritik atau evaluasi terhadap setiap literatur untuk mendapatkan kesimpulan yang berimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Satuan

Artikel 1 (Thohir et al., 2021)

Penelitian ini ingin memahami bagaimana persepsi dari guru-guru PAI atas kebijakan Merdeka Belajar yang telah dimandatkan oleh pemerintah. Penelitian tersebut menarik dalam hal ia menggunakan pendekatan mixed-method, yakni kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif untuk mengungkap objek penelitian. Kriteria narasumber yang dipilih adalah guru yang baru menyelesaikan studi pada 2019 sejumlah 563 orang. Pemilihan ini dapat dipahami sebagai sebuah keputusan yang tepat mengingat angkatan tersebut lulus bersamaan dengan

keluarnya kebijakan Merdeka Belajar serta pembelajaran daring di tengah pandemi. Jumlah sample yang cukup besar juga mengindikasikan bahwa data yang diperoleh peneliti sangat memadai untuk dilakukan analisa statistik, akan tetapi ia belum cukup mewakili populasi guru-guru PAI se-Indonesia.

Adapun hasil dari penelitian tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Banyak guru-guru yang merasakan bahwa mereka terpaksa mengintegrasikan pembelajaran dalam model daring. Namun, mereka memahami hal itu niscaya dengan kondisi pandemi yang sedang merebak.
2. Kemudian, guru-guru juga mempersepsi bahwa pembelajaran dalam mode daring belum dapat maksimal dilakukan karena tiga hambatan; (1) kekurangan infrastruktur, (2) kompetensi guru yang minim, (3) belum optimal dukungan dari manajemen sekolah.
3. Berikutnya, guru-guru menyatakan bahwa pembelajaran mustahil dilaksanakan secara maksimal, mengingat dalam pelajaran tertentu seperti baca Al-Qur'an, dibutuhkan interaksi fisik, atensi dan stimulasi langsung.
4. Terakhir, guru-guru itu menyadari bahwa mereka harus mengubah pola pengajaran menjadi lebih berpusat pada murid, dengan guru atau diri mereka sebagai facilitator semata. Demikian itu karena merdeka belajar menuntut lahirnya siswa yang memiliki karakter mandiri dalam belajar.

Kritik utama yang penting untuk ditujukan pada penelitian ini adalah hasil utama riset ini tidak selaras dengan tujuan yang telah dinyatakan. Bahwa persepsi mengenai Merdeka Belajar tidak banyak terungkap, dan justru persepsi mengenai pembelajaran daring yang mendapat perhatian paling banyak.

Artikel 2 (Ahid & Sufirmansyah, 2022)

Penelitian memiliki tujuan untuk secara komprehensif memahami perencanaan, implementasi, tantangan dan juga solusi dari kebijakan merdeka belajar pada suatu provinsi spesifik: Jawa Timur. Untuk menjawab pertanyaan penelitian itu, dilakukan analisa kualitatif terhadap data-data deskriptif yang didapat melalui, wawancara, pengamatan, dan teks kebijakan.

Dalam hal perencanaan, kebijakan merdeka belajar dirancang dengan alur sosialisasi empat pondasi dasar kampus merdeka secara langsung oleh mentri pendidikan dan kebudayaan. Perencanaan juga meliputi penyiapan infrastruktur daring sebagai sistem

database dan monitoring. Kemudian, pelaksanaan meliputi sekolah penggerak, eksekusi program turunan di setiap dinas dan optimalisasi sistem pembelajaran online.

Berikutnya masalah implementasi kampus merdeka yang terungkap antara lain perbedaan pemahaman atau persepsi berbagai pihak atas kebijakan merdeka belajar sekaligus ketidaksiapan guru, sekolah dan orangtua dalam implementasinya. Pula, tantangan yang ditemukan lainnya adalah keterlambatan pelaksanaan karena kemampuan ekonomi orangtua yang bervariasi menyebabkan sulitnya tersedia fasilitas belajar memadai secara merata pada semua siswa.

Solusi yang dilakukan untuk menangani permasalahan implementasi tersebut adalah: (1) Melaksanakan aktivities akar rumput dan workshop secara masif dalam rangka memperkuat pemahaman atas kebijakan merdeka belajar dan (2) menyelenggarakan pembelajaran luring terbatas.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang sangat kaya mengenai perencanaan hingga evaluasi dari implementasi kebijakan kampus merdeka, sayangnya ia belum berhasil menjabarkan secara detail, sistematis dan koheren. Misalnya saja, dapat dipahami bahwa manajemen memiliki lima aktivitas dasar, yaitu planning, organizing, actuating, controlling dan evaluating (Fahrurazi & Rosadi, 2021; Berliandaldo, 2016; Fakhruddin, 2011). Lima hal itu sayangnya hanya terungkap sebagian dalam penelitian ini. Pun, apa yang dipahami sebagai planning di dalam penelitian kurang tepat sehingga menyebabkan apa yang terungkap hanya sisi organizing dan sisi planning menjadi tidak terungkap.

Artikel 3 (Roqib & Sabiq, 2022)

Penelitian ini bertujuan dua hal: pertama mengeksplorasi paradigma pendidikan profetik di UIN Saizu. Kedua, untuk mengetahui bagaimana relevansi dari paradigma tersebut dengan upaya kampus untuk menyeleraskan diri dengan kebijakan Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Secara esensi, paradigma profetik itu juga dikenal dengan paradigma “Jabal Rahma”. Hal ini karena ia menggambarkan sebuah gunung, yang memiliki puncak pada tauhid, lalu pada dasar atau kaki gunungnya adalah pondasi yang terdiri dari berbagai jenis ilmu (mantik, fisika, bahasa, syariah, dan sebagainya). Selain itu juga gunung tersebut dekat dengan simbolisasi segitiga, atau trilogi aspek pembangunan manusia di UIN Saizu, yakni Intetelektualitas, Profesionalitas, dan Spiritualitas.

Penelitian ini mengungkap suatu kritik atas filosofi yang terkandung dalam merdeka belajar. Bahwa merdeka, meskipun mendorong otonomi atau kebebasan siswa, ia juga sangat getol dengan nilai output. Dari situlah kemudian kebijakan ini terlalu bersifat materialistik-kapitalistik. Kritik yang sama banyak diungkap oleh berbagai penelitian lain (Syaiful, Kurniadi & Rahman, 2022). Kehadiran dari paradigma pendidikan profetik berfungsi untuk melengkapi atau mengisi kekosongan nilai-nilai spiritual transendental yang melekat dalam Merdeka Belajar.

Penelitian ini sayangnya belum dapat memberikan kritik yang lebih dalam, terinci pada aspek-aspek filosofis Merdeka Belajar. Padahal, nilai-nilai dari paradigma pendidikan profetik yang ditawarkan kaya akan kekuatan yang tidak dimiliki oleh Merdeka Belajar.

Artikel 4 (Syaiful et al., 2022)

Secara kritis, penelitian ini berusaha menimbang kelebihan dan kekurangan dari kebijakan Merdeka Belajar. Kritik yang dibangun dengan kesadaran bahwa suatu kebijakan pendidikan akan bermuara pada perubahan social. Perubahan sosial yang terjadi karena manipulasi nilai-nilai di masyarakat oleh aturan-aturan yang mengekang dan membolehkan seperti dalam Merdeka belajar.

Di satu sisi, penelitian ini mengungkapkan bahwa elan vital dari Merdeka Belajar ialah menciptakan masyarakat pembelajar yang berjiwa mandiri, peka terhadap perubahan, teraktualisasi bakat minatnya, dan lincah-cepat menghadapi dinamika zaman.

Untuk mencapai itu maka Merdeka Belajar hadir dengan transformasi pokok di berbagai bidang. Pertama, Merdeka Belajar mendorong akselerasi integrasi teknologi informasi dalam pendidikan. Kedua, mengutamakan identifikasi potensi siswa dan melakukan usaha optimalisasinya. Ketiga, memangkas birokrasi, administrasi, dengan mendorong otonomi manajerial hingga di level sekolah.

Penelitian ini lantas melanjutkan dengan mengidentifikasi nilai-nilai neoliberalisme yang melekat dalam Merdeka Belajar. Misalnya saja, otonomi yang digaungkan sangat sejalan dengan individualisasi radikal yang berujung kepada penciptaan masyarakat egoistik-ekonomistik. Adapun jurnal ini secara cukup memadai telah membangun kritik yang tajam dengan sebelumnya mengungkap kelebihan-kelebihan dari merdeka belajar, dan melanjutkan dengan kritik atasnya.

Artikel 5 (Rohmad, 2020)

Penelitian ini ingin melihat bagaimana kewenangan guru-guru baik di lingkup sekolah maupun lingkup kelas pasca terbitnya Merdeka Belajar. Kewenangan atau otoritas guru itu

dipandang penulis sebagai sesuatu topik yang menarik karena ia berpengaruh kepada praksis, pengalaman dan efektivitas pembelajaran di kelas.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan guru semakin meluas dan menguat. Sebabnya, Merdeka Belajar menekankan pada desentralisasi kebijakan. Sebelumnya, segala kebijakan yang sifatnya detail, spesifik telah banyak di atur di tingkat pusat. Kini, guru-guru dan sekolah itu sendiri yang langsung memutuskan banyak kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal di institusinya.

Meskipun di satu sisi, otoritas guru semakin meluas dan menguat, namun hal ini menimbulkan persoalan baru di sisi lain. Bahwa tujuan utama dari Merdeka Belajar yaitu untuk mengurangi administrasi-birokrasi menjadi justru tidak terpenuhi. Guru-guru malah semakin menanggung beban tugas yang banyak yang menjadikan mereka jauh lebih kewalahan dibanding sebelum Merdeka Belajar. Bahkan, kenyataannya, perubahan yang berulang-ulang tanpa tuntasnya penyerapan kebijakan di akar rumput, kerap memperbesar beban guru untuk kembali beradaptasi dengan kebijakan baru itu (tercatat, Indonesia mengalami perubahan kurikulum hingga 10 kali sejak tahun 1947).

Artikel 6 (Trinova & Fitri, 2020)

Penelitian ini berusaha untuk menyoroti kehadiran kebijakan baru yang disebut Merdeka Belajar dengan titik tekan pada implikasi atas manajemen pendidikan secara umum di Indonesia. Akan tetapi, hasilnya dalam penelitian tersebut juga tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pertama, penelitian ini malah membahas Kampus Merdeka, atau satu sisi lain dari kebijakan tersebut. Walhasil, fokus kajian diarahkan membahas pada setting kampus. Misalnya, pembahasan mengenai sistem kredit mahasiswa, dan kebebasan dalam memilih mata kuliah. Adapun kajian mengenai setting sekolah tidak muncul. Hal ini tentu membuat pembaca menangkap inkonsistensi penulis atas judul yang disematkan dengan kajian, analisa dan paparan yang disajikan.

Kedua, penelitian ini juga minim membahas manajemen pendidikan atau sub turunan kajian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan biasanya diarahkan kepada berbagai elemen dalam institusi meliputi sumber daya manusia, finansial, infrastruktur, dan tujuan (Syahrani, 2019). Sayangnya, penelitian banyak membahas terkait pembelajaran di dalam kelas ketimbang manajemennya. Dengan demikian, penelitian ini kembali gagal dalam membahas secara komprehensif berbagai implikasi manajerial dari kebijakan merdeka belajar.

Artikel 7 (Pratikno et al., 2022)

Penelitian ini nampaknya ingin memahami sejauhmana kebijakan merdeka belajar di implementasikan di sekolah. Masalahnya, penggunaan bahasa inggris seperti terlalu literal dan seolah sekedar salin-tempel dari aplikasi penerjemahan. Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca menjadi sangat sulit dipahami.

Artikel 8 (Kande, 2022)

Dari judul yang disajikan dan tujuan yang dinyatakan, penelitian ini berfokus untuk memberi masukan kepada kebijakan kampus merdeka agar dapat lebih ‘balance’. Adapun untuk menjawab apa yang perlu mengalami penyeimbangan itu, peneliti menyajikan terlebih dahulu sebuah jabaran yang mendalam tentang Merdeka Belajar.

Hal baru yang menarik dan penting dari penelitian ini adalah ia mengungkap Merdeka Belajar bukan sekedar sebagai sebuah ‘kebijakan’. Melainkan, disamping sebagai kebijakan, Merdeka Belajar juga merupakan ‘filosofi’, ‘mindset’, dan utamanya ‘kultur’.

Filosofi yang dimaksud hampir sejalan dengan pandangan dari berbagai peneliti lain (Kodrat, 2021; Roqib & Sabiq, 2022; Syaiful et al., 2022). Bawa baik penelitian ini dan yang lainnya, sama-sama mengamini hakikat manusia selaku makhluk bebas, mandiri. Namun, penulis disini mengurai lebih detail filosofi kebebasan itu dengan mengutip pandangan pendidikan liberal Barat (yang mendukung secara ekstrim kebebasan atau liberalisasi). Aspek dari kapitalisasi atau objektifikasi manusia yang banyak dikritik peneliti lain, sayangnya tidak banyak terungkap olehnya (Kodrat, 2021).

Adapun dalam hal mindset, peneliti menekankan pada usaha pemerintah untuk menyadarkan semua stakeholder pendidikan mengenai pentingnya mendorong perubahan ke arah yang lebih modern, kreatif dan luwes. Sebagaimana dalam artikel itu tertulis:

“Konsep merdeka belajar mengubah mindset pelaku pendidikan untuk melakukan transformasi dalam belajar. Belajar dapat dilakukan di mana saja dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terhubung dengan keperluan belajar. Sumber belajar dipahami sebagai semesta belajar. Interaksi belajar dari dua arah ke multi-arah. Dari kelompok ke lingkungan jaringan. Dari stimulasi tunggal ke stimulasi segala penjuru. Dari alat tunggal menuju alat berbasis multimedia. Dari individual menuju kooperatif. Dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan. Dari usaha sadar tunggal menuju ilmu pengetahuan jamak. Dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. Dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Dari pemikiran faktual menuju pembelajaran kritis. Dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Dari pembelajaran berbasis

materi ke pembelajaran kompetensi. Dari penilaian mata pelajaran ke penilaian lintas disiplin.” (Kande, 2022, p. 6)

Sayangnya untuk aspek terakhir, atau kultur, peneliti tidak menjelaskan kultur apa yang dituju oleh Merdeka Belajar. Melainkan, peneliti banyak menulis seputar apa itu budaya secara umum tanpa menjelaskan budaya apa yang menjadi muara akhir dari Merdeka Belajar.

Artikel 9 (Nanggalaupi & Suryadi, 2021)

Penelitian ini mengkaji Merdeka Belajar dengan pendekatan analisis-filosofis. Yang menarik bahwa, penelitian ini berusaha mendiskusikan objek kajian (Merdeka Belajar) melalui perspektif dari tokoh-tokoh besar dunia, seperti Robert Hutchins, John Dewey dan Paulo Freire serta seorang tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kajian ini memberi ekspektasi mengenai sebuah investigasi kritis nan komparatif, karena melibatkan berbagai sudut pandang teori-teori besar filsafat pendidikan.

Sayangnya, peneliti gagal untuk melakukan kajian yang baik. Sebabnya, peneliti tidak mampu mengidentifikasi dengan tepat konsep-konsep dasar filosofis pada masing-masing tokoh. Misalnya, saja Paulo Freire yang sekedar dipahami dalam kerangka humanisme yang sangat umum, namun tidak menyentuh praksis teori yang menjadi ciri khas Paulo Freire. Teori seperti dualisme jiwa, liberasi-aksi, konsientisasi, hingga ‘bahasa rakyat’ tidak terungkap (Freire, 2020). Akibatnya, peneliti melakukan berbagai kekeliruan dengan menyatakan kelemahan teori Paulo Freire dibandingkan dengan pemikiran lain.

Pun, demikian halnya dengan teori pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang sejatinya dikenal dengan filosofi trilogi pendidikan, berupa kalimat “Ing Ngarso Sun Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani” (Wiryopranoto et al., 2017). Dalam penulisannya, peneliti tidak mampu membongkar dinamika dan kompleksitas dari trilogi itu dan sekedar berfokus pada beberapa konsep lain yang merupakan bagian sangat kecil dari bangunan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara.

Artikel 10 (Wilujeng et al., 2020)

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis, pasang-surut, perubahan-perubahan kebijakan hingga kondisi pendidikan Indonesia terkini (meliputi Merdeka Belajar) dengan analisa filosofis. Untuk mencapai tujuan itu, peneliti menggunakan dua sumber pustaka dari para ahli sejarah pendidikan Indonesia, yaitu 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan (Tilaar, 1995) dan Pendidikan yang Berkebudayaan (Latif, 2020).

Hasil analisis mereka menunjukkan berapa hal:

1. Pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang justru mengarah kepada lunturnya nilai-nilai Pancasila, secara khusus sila kedua yang berbunyi,”Kemanusiaan yang Adil dan beradab”. Dengan demikian sebetulnya muncul semacam ironi. Bahwa, reformasi dan demokrasi yang telah dihasilkan tidak mengarah kepada pemantapan nilai dasar negara yang selama ini terus digaungkan. Hal ini disepakati oleh berbagai penelitian lain (Amalia & Najicha, 2022; Oktari & Dewi, 2021; Widiastuti, 2021).
2. Kehadiran berbagai kebijakan baru, termasuk Merdeka Belajar tidak bersama dengan diubahnya paradigma pendidikan, yaitu positivisme dan pragmatisme. Positivisme menyebabkan pengagungan pada ilmu-ilmu eksakta dan peminggiran ilmu-ilmu sosial, seni budaya. Dampaknya, siswa atau peserta didik menjadi kehilangan kepekaan ruhaniah. Demikian pula pragmatisme mendorong pelajar dan guru untuk berfikir individualistik dan egoistik. Nilai-nilai kolektivitas pun semakin pudar.
3. Beberapa masukan dari penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan jumlah jam atau beban belajar yang terlalu besar yang menyebabkan peserta didik sulit untuk mengembangkan diri di luar. Pula, orientasi yang terlalu mengarah kepada dunia usaha/industri perlu dikaji ulang. Hal ini mengingat bahwa pendidikan bukan sekedar komoditas, melainkan hak segala anak bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan berjiwa patriot tinggi.

Kelemahan utama dari penelitian ini adalah kegagalan mereka untuk menunjukkan bentuk-bentuk atau gejala-gejala nyata yang menggambarkan berbagai kelemahan-kelemahan dari paradigma pendidikan Indonesia (Sarma, 2015). Dampaknya, hasil penelitiannya terkesan terlalu abstrak atau tidak mewakili realitas secara objektif.

PEMBAHASAN

Tema 1: Tidak bebas nilai

Dalam berbagai artikel, utamanya ditemukan kesepakatan bahwa MBKM tidak bebas dari nilai tertentu. Bahwa MBKM bukan suatu kebijakan yang tidak memiliki kepentingan di baliknya dalam menciptakan manusia hasil didik dengan karakteristik tujuan. Tema ini sesuai dengan berbagai penelitian lain yang menunjukkan bahwa ‘objektivisme’ atau netralitas nilai merupakan hal yang absurd terjadi. Justru sebaliknya, suatu produk atau kebijakan mengandung subjektivitas dan muatan nilai tertentu.

Setidaknya hal ini diakui oleh pemerintah dengan hadirnya ‘tujuan’ dari MBKM. Sayangnya, tema berikutnya tidak menunjukkan bahwa tujuan “*mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil*

Pelajar Pancasila" tampil sebagai yang utama membentuk MBKM itu sendiri. Tema-tema berikutnya menunjukkan pandangan para peneliti mengenai nilai apa yang sebenarnya terkandung di dalam MBKM.

Tema 2: Liberalisasi dan kapitalisasi

Para peneliti memandang bahwa tujuan utama dari MBKM adalah mendorong individualisasi kepada model liberalisasi dan penguatan ekonomi sebagaimana model kapitalisasi. Pada yang pertama, MBKM hadir dengan menguatkan slogan-slogan individualitas, seperti merdeka, mandiri, dan unik. Hal ini kemudian diterjemahkan dengan program-program yang semakin memutus hubungan antara satu individu dengan yang lain atau bahkan antara lembaga satu dengan yang lain (dalam konteks perubahan kampus PTN-BH, misalnya).

Adapun orientasi pada nilai kapitalisasi sangat kental jika ditilik dari berbagai program yang diaktualisasi. MBKM dinilai terus memperkuat orientasi pendidikan sebagai pabrik pengolah tenaga industri dan konsumen pasar. Hal ini menurut para peneliti tampak dari syarat akreditasi atau pendirian prodi yang banyak mencantumkan keterlibatan industri serta keselarasan visi pendidikan dengan arus pasar. Disini terdapat kecurigaan yang muncul bahwa ‘unggul’ yang tercantum dalam tujuan tidak mencerminkan keunggulan dalam karakter dan spiritualitas. Kecurigaan ini menguat dengan keberadaan tema berikutnya.

Tema 2: Pragmatisme dan materialisme

Pendidikan dalam MBKM diarahkan kepada sejauhmana ia memiliki nilai kemanfaatan. Nilai manfaat atau nilai praktis itu sering ditampilkan sebagai dasar mengukur sejauhmana sesuatu telah ‘merdeka’. Nilai-nilai religius spiritual yang bersifat transenden sejatinya juga bermanfaat bagi individu dalam menunjukkan hakikat dirinya sebagai hamba Tuhan. Namun, dalam konteks MBKM nilai pragmatisme yang dimaksud lebih diarahkan kepada kemanfaatan bagi siklus produksi-konsumsi. Tentu hal ini mengandaikan materialisme pada MBKM sebagai maksud ‘nilai manfaat’ dari pragmatismenya.

Makna materialisme juga ditemukan dominan dalam MBKM. Artikel-artikel yang dikaji melihat bahwa konektivitas pada industri atau pasar yang digaungkan oleh MBKM tidak lain merupakan manifestasi dari materialisme. Bahwa siswa atau mahasiswa didorong untuk terus memahami bahwa mengembangkan diri berarti memiliki lebih banyak entah dalam bentuk pengalaman-pengalaman kerja di luar atau dapat mengintegrasikan diri dengan logika industri yang profit-seeking. Hal ini tentu bertabrakan dengan tujuan membentuk

‘profil pancasila’ yang lebih banyak mendorong kesukarelaan dan kesadaran dalam membangun bangsa dan negara.

Implikasi pada Strategi Belajar

Implikasi 1: Reduksi otoritas dan peningkatan partisipasi

Literatur yang ditinjau menunjukkan terdapat perubahan pada dua segi yang saling berelasi. Dari segi otoritas, MBKM terus memangkas kekuasaan guru atau dosen di dalam kelas yang sebelumnya bernilai besar atau dominan. Mulai dari perencanaan, pengajaran hingga evaluasi semuanya ditanggung oleh guru-dosen sebelum MBKM. Guru-dosen kemudian dituntut untuk membuka keran komunikasi dengan siswa/mahasiswa sebagai cara mendorong keterlibatan peserta didik.

Dengan berkurangnya otoritas guru-dosen, MBKM juga menambah peran dari peserta didik. Demikian membuat mereka harus lebih banyak terlibat bahkan idealnya turut menentukan peta dan proses belajar yang akan mereka lakukan. Mahasiswa misalnya, dapat mengatur tiga semester untuk belajar di luar prodinya, selama relevan dengan kebutuhan atau aspirasi pribadi mahasiswa itu.

Peningkatan partisipasi ini sayangnya tidak mendorong kesadaran dan pemahaman peserta didik atas dirinya. Yang terjadi justru mereka sekedar dipaksa untuk dapat mengikuti berbagai program MBKM yang secara administratif menambah beban lain baik bagi mereka maupun pengajar. Dampaknya, bahwa peserta didik dan pengajar kewalahan dengan berbagai perubahan namun kehilangan esensi untuk dari proses belajar itu. Dari sini nampak bahwa otoritas dari guru atau dosen berkurang, namun otoritas negara justru semakin kuat dan mengetatkan proses pembelajaran menjadi lebih tidak fleksibel atau luwes.

Implikasi 2: Bertambah jam praktik atau jam industri

Artikel-artikel yang ditinjau menemukan kecenderungan dari MBKM untuk mendorong jam-jam luar kelas yang bercorak praktikal atau industrial. Siswa dan mahasiswa dituntut untuk memiliki waktu belajar entah jam diskusi dengan para pekerja lapang maupun pakar atau jam belajar magang di perusahaan. Meskipun sekilas berbeda, sejatinya mereka semua berfungsi memperkuat ikatan antara pendidikan dengan industri dan pasar. MBKM menilai bahwa pengalaman tersebut akan membuat peserta didik memiliki keterampilan teknis, memahami persoalan dunia nyata dan dapat segera terserap selepas lulus.

Hal ini sayangnya menghasilkan dampak lain yang seringkali tidak kentara. Banyaknya jam praktik atau magang tentu akan memangkas jam-jam belajar yang sifatnya teoritik dan reflektif. Padahal, kualitas dari praktik secara khusus dan pendidikan secara

umum akan berkurang secara dramatis ketika peserta didik tidak dibekali dengan landasan teori yang cukup serta kemampuan refleksi diri atau berpikir kritis. Dalam konteks ini, maka MBKM dipandang memiliki kontradiksi internal. Di satu sisi MBKM memiliki tujuan, akan tetapi strategi belajar yang aktual terjadi berbeda atau bahkan berseberangan dengan tujuannya. Kontradiksi semacam ini semakin memperkeruh tujuan utama pembelajaran yaitu membentuk karakter moral dan mempersiapkan pribadi dalam menjawab tantangan masa depan. MBKM mengandaikan penguatan industri dan pasar di masa depan namun mengabaikan kemungkinan dunia masa depan alternatif dimana kecerdasan buatan dapat membantu meringankan kerja-kerja manusia. Atau bahkan yang lebih berbahaya, bahwa MBKM tidak menyadari suatu gambaran masa depan selain yang mereka pahami. Peserta didik sebagai yang akan mengalami pada masanya kelak tentu paling terimbas. Seharusnya, MBKM dapat benar-benar menegakkan kata ‘merdeka’. Yang terjadi MBKM malah membatasi narasi dan visi pendidikan dengan orientasi kapitalistik yang dominan.

KESIMPULAN

Hasil dari peninjauan menunjukkan bahwa mayoritas penulis artikel menilai terdapat masalah dalam filsafat pendidikan MBKM. Masalah itu berupa kecenderungan pendidikan untuk mendorong pada neoliberalisasi atau penundukan segala di hadapan kepentingan pasar dan individualisasi atau penguatamaan individu di atas kelompok. Implikasinya, guru atau dosen cenderung menerapkan strategi belajar yang berfokus pada individu dan mengarahkan pembelajaran pada kebutuhan industri atau pasar.

Saran dari penelitian ini ditujukan untuk berbagai stakeholder di dunia pendidikan Indonesia. Pertama, bagi pemerintah agar mengadakan peninjauan ulang secara mendalam terhadap dasar filosofis yang menjadi kerangka teori pendidikan MBKM serta praktiknya di lapangan. Kedua, bagi akademisi dan praktisi dapat memperkuat komunikasi dan memberikan saran-masukan kepada pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan-kebijakan pendidikan.

REFERENSI

- Ahid, N., & Sufirmansyah, S. (2022). The Implementation of Merdeka Belajar Policy in East Java. *Didaktika Religia*, 10(1), 149–168.
- Amalia, F. R., & Najicha, F. U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Lunturnya Nilai Nasionalisme dan Cinta NKRI di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan (UPY)*, 6(1).
- Arif, M., & Sulistianah, S. (2019). Problems in 2013 Curriculum Implementation for

- Classroom Teachers in Madrasah Ibtidaiyah. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 6(1), 110-123.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Freire, P. (2020). Pedagogy of the oppressed. In *Toward a sociology of education* (pp. 374–386). Routledge.
- Kande, F. A. (2022). Rebalancing Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *TRI PANJI, Liberal Arts Journal*, 1(1), 1–14.
- Kemendikbud. (2020). *Merdeka Belajar*. Kemendikbud.Go.Id.
- Kodrat, D. (2021). Industrial mindset of education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) policy. *Islamic Research*, 4(1), 9–14.
- Kominfo. (2020). *Nawa Cita: 9 Program Perubahan untuk Indonesia*. Kominfo.Go.Id.
- Latif, Y. (2020). *Pendidikan yang berkebudayaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, V. N. S. (2020). Bombastisnya Covid-19 dalam Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. *MERDEKA BERPIKIR*, 73.
- Nanggalaupi, A., & Suryadi, K. (2021). Kampus Merdeka dalam Perspektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire serta Perdebatan Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan John Dewey Vs Robert M. Hutchins. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
- Oktari, D., & Dewi, D. A. (2021). Pemicu Lunturnya Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 93–103.
- Pigott, T. D., & Polanin, J. R. (2020). Methodological guidance paper: High-quality meta-analysis in a systematic review. *Review of Educational Research*, 90(1), 24–46.
- Pratikno, Y., Hermawan, E., & Arifin, A. L. (2022). Human Resource ‘Kurikulum Merdeka’ from Design to Implementation in the School: What Worked and What not in Indonesian Education. *Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan*, 7(1), 326–343.
- Purike, E. (2021). Political Communications of The Ministry of Education and Culture about “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Independent Learning, Independent Campus)” Policy: Effective? *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 1(1), 1–8.
- Rohmad, M. A. (2020). The authority of teacher in merdeka belajar discourse. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 10(2), 43–54.
- Roqib, M., & Sabiq, A. H. A. (2022). The Prophetic Education Paradigm as the Scientific Integration of UIN Saifuddin Zuhri in Merdeka Belajar Policy. *Al-Ta Lim Journal*, 29(1), 1–14.
- Sarma, S. K. (2015). Qualitative research: Examining the misconceptions. *South Asian Journal of Management*, 22(3), 176.
- Suryana, C., & Iskandar, S. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan konsep merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7317–7326.
- Syaiful, A., Kurniadi, P., & Rahman, M. (2022). Merdeka Belajar: a New Paradigm of Islamic Education in the Setting of Social Change. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 156–169.
- Thohir, M., Maarif, S., Rosyid, J., Huda, H., & Ahmadi, A. (2021). From disruption to mobilization: Ire teachers’ perspectives on independent learning policy. *Cakrawala*

- Pendidikan, 40(2), 359–373.
- Tilaar, H. A. R. (1995). *50 tahun pembangunan pendidikan nasional, 1945-1995: suatu analisis kebijakan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Trinova, Z., & Fitri, I. (2020). Independent learning a new paradigm concept in learning management in Indonesia. *International Conference Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 60–66.
- Widiastuti, N. E. (2021). Lunturnya Sikap Nasionalisme Generasi Milenial Terhadap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(2), 80–86.
- Wilujeng, S. R., Syamsuddin, M. M., & Murtiningsih, R. S. (2020). Dinamika Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Filsafat. *HUMANIKA*, 27(2), 170–183.
- Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D., & Tangkilisan, Y. B. (2017). *Ki Hajar Dewantara: pemikiran dan perjuangannya*. Museum Kebangkitan Nasional.